

**PENGARUH KOMPETENSI DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**THE EFFECT OF VILLAGE OFFICERS COMPETENCY, PUBLIC
PARTICIPATION, AND UTILIZATION OF INFORMATION
TECHNOLOGY ON VILLAGE FUND MANAGEMENT**

Dara Fitrinanda

Linda

Maya Febrianty L

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala

darafitri97@gmail.com

linda.eka11@gmail.com

maya_lautania@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to examine the effect of village officers competency, community participation and utilization of information technology on village fund management. Data was obtained through distributing questionnaires to 55 village officers from 11 villages in the city of Jantho Subdistrict, Aceh Besar District. Statistical testing using multiple linear regression analysis with SPSS application.

The results showed that (1) the competence of the village officers, public participation, and utilization of information technology had a positive effect on village fund management, (2) the competence of village officers had a positive effect on village fund management, (3) public participation had a positive effect on village fund management. (4) the use of information technology has a positive effect on village fund management.

Keyword: *Competency Village Officers, Public Participation, Information Technology, Village Financial Management.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan desa. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 55 perangkat desa dari 11 desa di Kecamatan kota Jantho, Aceh besar. Pengujian statistik menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, (2) kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, (3) partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan

keuangan desa, (4) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: *Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Teknologi Informasi, Pengelolaan Keuangan Desa.*

A. Pendahuluan

Keberadaan dana desa merupakan perwujudan dari penyelenggaraan hak otonomi desa dengan tujuan meningkatkan kemandirian desa. Dana desa akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa apabila dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Provinsi Aceh merupakan provinsi ke tiga tertinggi secara nasional yang menerima dana desa. Jumlah dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ke desa-desa di Aceh selama 4 tahun (2015-2018) sudah mencapai Rp 14,8 triliun. Dengan dana tersebut seharusnya sudah ada indikator-indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada APBD Tahun Anggaran 2019, Provinsi Aceh menerima alokasi dana otonomi khusus sejumlah Rp 8.357.471.654. Dana ini di alokasikan ke seluruh desa di Provinsi Aceh dalam bentuk dana pembangunan desa. Dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut, tentu terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Seharusnya, melalui dana desa tersebut masyarakat mampu berinisiatif, berinovasi membuka ruang aspirasi, berpartisipasi untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan keberdayaan rakyat Aceh.

Kecamatan Kota Jantho merupakan pusat pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan salah satu daerah yang mendapat alokasi dana desa. Kecamatan Kota Jantho terdiri dari 13 desa. Berdasarkan letak pusat administrasinya, dapat diketahui bagaimana kondisi desa di sekitaran pengawasan pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berkedudukan di Kecamatan Jantho. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tenaga Ahli Pemberdayaan Desa, bahwa pada umumnya realisasi dana desa belum digunakan secara tepat dan sesuai sasaran. Hal tersebut disebabkan karena pengelolaan keuangan belum dapat di laksanakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik atas penggunaan dana desa tentu dapat mengurangi ketimpangan, penciptaan lapangan kerja dan penurunan jumlah

penduduk miskin. Akan tetapi, hal tersebut saat ini belum dapat terealisasi dan masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan desa.

Ketentuan umum Permendagri No. 20 tahun 2018 memberikan petunjuk tentang manajemen pedesaan termasuk cara perencanaan, implementasi, administrasi, pelaporan dan pelaporan keuangan pedesaan. Hak otonom pedesaan mengharuskan otoritas pedesaan untuk mampu secara mandiri mengelola keuangan mereka, baik dalam hal mengelola pendapatan dan sumber pendapatan, maupun dalam hal mengelola pengeluaran anggaran.

Pengelolaan dana desa yang optimal tentu harus dibarengi dengan kompetensi yang memadai dari perangkat desa agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Hevesi (2005) menjelaskan kompetensi ini merupakan ciri khas seseorang untuk melakukan keterampilan kerja (pengetahuan) yang terukur, pengetahuan (kapabilitas) dan kemampuan (kapabilitas). Perangkat desa diwajibkan untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan menetapkan kebijakan melalui program, kegiatan dan prioritas kebutuhan masyarakat, agar dapat mencapai perekonomian desa yang baik dan kemakmuran masyarakat desa. Kompetensi dapat dilihat dari kemampuan dalam mencapai kinerja, agar dapat menghasilkan *output* yang diinginkan.

Penelitian Husna dan Abdullah (2016) terkait dengan kesediaan pejabat desa untuk mengelola keuangan di beberapa desa di wilayah Pidie menunjukkan bahwa hambatan utama bagi pejabat desa saat mengelola keuangan pedesaan adalah kompetensi atau sumber daya manusia yang rendah. Informasi yang diterima dari masyarakat, menunjukkan banyak kendala dalam pelaksanaan dana desa di Kecamatan Jantho. Masalah utama yang timbul umumnya menyangkut dengan rendahnya pendidikan perangkat desa.

Selain perangkat desa, masyarakat umum juga berperan dalam pengelolaan keuangan desa. Adisasmita (2006) mengungkapkan beberapa alasan pentingnya peran masyarakatnya, antara lain dapat menganalisis penyebab serta mengatasi permasalahan-permasalahan di desanya. Masyarakat juga berpotensi meningkatkan pembangunan serta meningkatkan produktivitas. Kemudian, masyarakat dapat

meminimalisir atau menghilangkan ketergantungan terhadap pihak luar, yang pada akhirnya dapat menciptakan pemerintahan desa yang mandiri.

B. Kajian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan manajemen keuangan pedesaan sebagai sebuah perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, serta pengambilan tanggung jawab terhadap pembiayaan pedesaan. Mengelola keuangan desa memiliki efek yang signifikan terhadap keberhasilan sebuah desa dalam rangka menjadikan desa lebih mandiri.

Pengelolaan keuangan perdesaan dilakukan secara terintegrasi dan diimplementasikan dalam APBD setiap tahun melalui bupati/walikota. Pembiayaan pedesaan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, paartisipatif, dan tertib disiplin. Manajemen desa yang baik dapat berkembang dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa serta dapat mengurangi angka kemiskinan. Upaya melawan kemiskinan salah satunya dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun dan memelihara fasilitas dan infrastruktur pedesaan.

2. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Hasibuan (2010), pengembangan kompetensi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas, kualitas, dan jumlah karyawan. Sehingga akan lebih baik apabila perangkat desa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa selalu berupaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang pada akhirnya akan mempunyai keterampilan teknis dan manajemen yang mumpuni. Keterampilan yang dimiliki oleh perangkat desa itu akan mempengaruhi layanan terhadap masyarakat dan meningkatkan layanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Mitrani (2002) menyebutkan bahwa kompetensi memiliki dua pengertian, yaitu kompetensi sebagai pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh dari

proses pembelajaran, serta kompetensi yang lahir dari sifat-sifat dalam diri manusia. Perangkat desa berpendidikan rendah akan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah dengan tepat. Besarnya tuntutan masyarakat memberi isyarat pada pemerintah desa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya perangkat desa.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Partisipasi ialah pengembangan masyarakat digunakan secara luas serta umum. KBBI membahas partisipasi dalam berbagai acara (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 831). Definisi lain menyatakan partisipasi itu adalah kerja sama orang-orang, pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, memelihara, serta mengembangkan pembangunan (Soetrisno, 1995). Partisipasi individu/kelompok masyarakat dalam pembangunan dapat juga didefinisikan sebagai tindakan yang berkontribusi pada pikiran, energi, waktu, pengalaman, modal dan / atau bahan, serta partisipasi dalam penggunaan dan penggunaan hasil pembangunan.

Menurut Fasli Djalal (2001) partisipasi adalah apabila pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat umum untuk ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari dasar pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dapat menjadi jalan keluar, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan desa (Cohen dan Uphoff, 1977), bahkan merupakan masukan yang mutlak diperlukan bagi pembangunan desa (Mubyarto, 1984). Partisipasi masyarakat juga dapat di anggap sebagai kontribusi masyarakat terhadap pembangunan pedesaan, baik pada tahap perencanaan, pada tahap pengambilan keputusan, tahap implementasi, serta pada tahap penilaian program pembangunan desa (Marzuki, 2004).

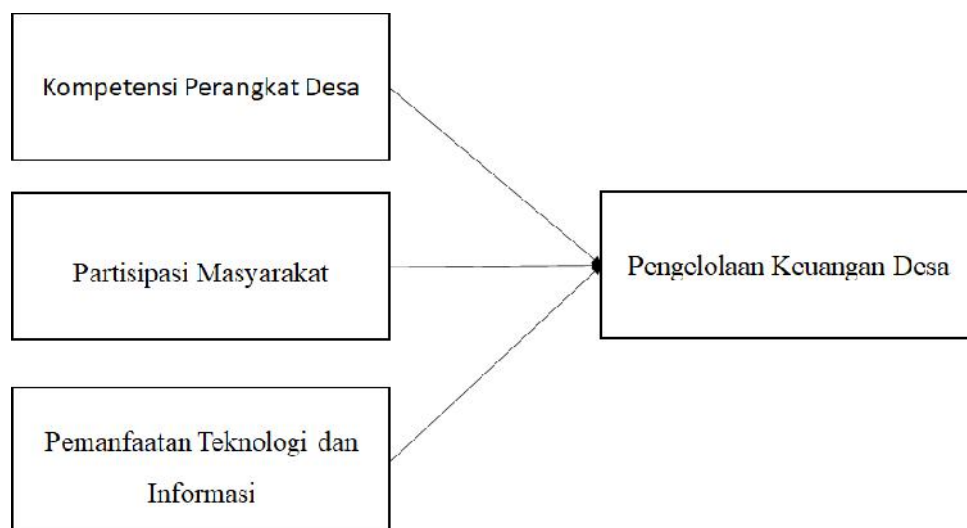
4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Pada Permendagri No. 56 Tahun 2010 menyatakan bahwa sistem akuntansi di pemerintah daerah mencakup sejumlah prosedur, dimulai dengan proses pengumpulan data, pendaftaran, peringkasan, dan diakhiri dengan pelaporan

keuangan sebagai bagian dari pelaporan sehingga dapat dilakukan secara manual atau lebih menggunakan teknologi. Manfaat yang diberikan teknologi informasi sangat berguna bagi menunjang kegiatan pembuatan setiap laporan (Wahana Komputer, 2003).

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah mekanisme tambahan (sistem pendukung), yang keberadaannya diharapkan dapat mendukung implementasi proses bisnis dalam suatu organisasi. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan layanan di sektor publik (Rahadi, 2007) dan memengaruhi pekerjaan badan publik (Mardjiono, 2009). Selain kemampuan untuk meningkatkan layanan, TIK juga berguna dalam memproses data yang dapat digunakan untuk merencanakan pengembangan, mendukung pengambilan keputusan, memfasilitasi proses perencanaan, dan memantau dan mengevaluasi hasil pengembangan (Mayowan, 2017). Pekerjaan yang terkait dengan administrasi, manajemen keuangan, dan pendaftaran populasi, terutama untuk populasi masyarakat yang besar, sangat membutuhkan adanya dukungan aplikasi yang andalsehingga dapat mempermudah dan meningkatkan tingkat keakuratan data.

Dari penjelasan di atas, maka skema kerangka pemikiran dan hubungan antara variabel untuk permasalahan ini dapat di lihat pada gambar 1.



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

5. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran, maka pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut:

H1: Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

H2: Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

H3: Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tiga variabel bebas yaitu kompetensi perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

C. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan acuan kerangka kerja yang akan berfungsi sebagai penuntun peneliti dalam melakukan penelitiannya. Menurut Sekaran (2017) ada enam aspek dasar desain penelitian, yaitu tujuan studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, konteks studi, unit analisis, dan horizon waktu studi. Tujuan studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan responden penelitian adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Keuangan (bendahara) dari setiap desa di kecamatan Kota Jantho. Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji pengaruh variabel-variabel bebas yaitu *Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat* dan *Pemanfaatan Teknologi Informasi* terhadap kualitas *Pengelolaan Keuangan Desa*.

2. Populasi dan Sampel

Data diperoleh dari penyebaran 55 kuesioner kepada responden pada 11 desa dari 13 desa yang menjadi populasi di Kecamatan Kota Jantho. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *probability sampling* yaitu *simple random sampling*. Setiap perangkat desa dipilih 5 orang responden dengan jabatan Keuchik, Sekretaris, Bendahara, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi, sehingga jumlah seluruh responden penelitian ini sebanyak 55 orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara metode survei yang menggunakan pertanyaan/ Pernyataan kepada subjek penelitian secara tertulis (kuesioner). Kuesioner yang telah diisi kemudian ditabulasi menggunakan Microsoft Excel 2010 dan diproses menggunakan program SPSS versi 21. Peneliti memberikan kuesioner secara langsung kepada responden. Dari 55 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 55 kuesioner kembali, artinya tingkat pengembalian kuesioner (*responds rate*) adalah sebesar 100%. Berikut disajikan data pengembalian kuesioner dan karakteristik responden penelitian (Tabel 1).

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif dari Identitas Responden

Indikator		Frekuensi	Persen (%)
1. Jenis Kelamin	Pria	49	89,1
	Wanita	6	10,9
2. Usia	21–30 Tahun	7	12,7
	31–40 Tahun	17	30,9
	41–50 Tahun	19	34,5
	>50 Tahun	12	21,8
3. Pendidikan terakhir	SD	4	7,3
	SMP	12	21,8
	SMA	26	47,3
	S1	13	23,6
4. Masa Kerja	<1 Tahun	3	5,5
	1–3 Tahun	25	45,5
	4–5 Tahun	15	27,3
	>5 Tahun	12	21,8
5. Jabatan	Keuchik	11	20,0
	Sekretaris	12	21,8
	Bendahara	11	20,0
	Kepala urusan (Kaur)	11	20,0

	Kepala Seksi (Kasi)	10	18,2
--	---------------------	----	------

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 1, dilihat dari jenis kelamin responden, maka terdapat lebih banyak responden pria, sebanyak 89,1%, sedangkan responden wanita hanya sebanyak 6 orang atau 10,9%. Dilihat dari segi usia responden, responden paling banyak berumur di antara 41–50 tahun (34,5%), sedangkan paling sedikit berumur 21–30 tahun (12,7%). Dilihat dari segi pendidikan sebanyak 23,6% merupakan lulusan S1, lulusan SMA sebanyak 47,3%, lulusan sebanyak SMP 21,8%, dan paling sedikit adalah lulusan SD yaitu 7,3%. Menurut masa bekerja, maka responden paling banyak terdapat dalam rentang waktu 1–3 tahun yaitu sebesar 45,5%.

3. Pengukuran Variabel

Kompetensi Perangkat Desa

Berdasarkan penelitian Moses (2012), terdapat tiga indikator dalam mengukur kompetensi perangkat desa, yaitu pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Ketiga indikator tersebut mempengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa yang kompeten adalah perangkat yang memiliki tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja yang tinggi.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007), partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam melakukan perubahan yang ditentukannya oleh dirinya sendiri. Dimana proses partisipasi ini dilakukan didalam suatu proses yang aktif, dan masyarakat yang terkait tersebut dapat mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan partisipasi tersebut. Sehingga pada akhirnya partisipasi itu dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan sendiri. Dalam pengelolaan keuangan desa, asas partisipatif merupakan ajakan kepada masyarakat untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Manfaat yang ditawarkan oleh teknologi informasi termasuk pemrosesan transaksi dan persiapan laporan, akurasi komputasi, volume penyimpanan data yang besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, dan kemampuan multi-

pemrosesan (Wahana Komputer, 2003). Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat mempermudah masyarakat mengakses informasi-informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Teknologi informasi juga memiliki kelebihan dalam tingkat keakuratan dan kehandalan hasil operasi dengan mengurangi jumlah kesalahan yang ada.

4. Model Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian terhadap hipotesis baik secara parsial maupun simultan, dilakukan setelah model regresi yang digunakan bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Berikut persamaan dalam penelitian ini:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa
a	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
X1	= Kompetensi Perangkat Desa
X2	= Partisipasi Masyarakat
X3	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
e	= Error

D. Hasil Pengolahan Datadan Pembahasan

1. Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar dapat mengukur sesuai dengan tujuan penelitian ini. Uji validitas ini berfungsi untuk menentukan seberapa cermat alat ukur dapat melakukan fungsinya sebagai alat ukur. Alat ukur yang tinggi berarti mempunyai varian kesalahan yang kecil, sehingga memberikan keyakinan bahwa data yang terkumpul merupakan data yang dapat dipercaya. Hasil uji validitas variabel untuk penelitian menunjukkan semua indikator variabel dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur terhadap variable penelitian.

2. Hasil Uji Reliabilitas

Bahri dan Fakhry (2014) menyebutkan uji reliabilitas dapat mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsistensi responden dalam menjawab item pertanyaan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. Uji ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keakuratan dan konsistensi apabila dilakukan pengujian ulang dan pada waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan pada 36 item pernyataan menggunakan *Cronbach's Alpha* dan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 21. Sekaran (2017) menyatakan bahwa pada umumnya reliabilitas yang nilai r-nya kurang dari 0,6 dapat dikatakan kurang reliabel, antara 0,6 sampai 0,8 adalah cukup reliabel, dan diatas 0,8 maka suatu instrument dikatakan baik. Hasil Uji Reliabilitas untuk variabel yang di gunakan dalam penelitian, seperti yang dapat di lihat pada Tabel 2, menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini adalah memiliki tingkat reliabel yang baik.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item pertanyaan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis <i>Cronbach's Alpha</i>	Ket.
Kompetensi Perangkat Desa (X1)	9	0,835	0,60	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X2)	5	0,752	0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	8	0,816	0,60	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	14	0,851	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah (2019)

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan ujistatistik non-parametik Kolgomorov-Smirnov pada SPSS. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2001). Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Apabila tingkat signifikansi (2-tailed) > 0,05 maka model regresi tersebut dapat di katakan

terdistribusi secara normal, tetapi sebaliknya jika tingkat signifikansi (2-tailed) <0,05 maka model regresi tersebut tidak terdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov hasil uji normalitas untuk model regresi di penelitian menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,972 (Tabel 3). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

Tabel 3. Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	21717965
	Most extreme Absolute Differences	.066
Kolmogorov-Smirnov Z	Positive	.051
	Negative	.066
Asymp. Sig. (2 tailed)		.487
		.972

a. Test distribution is Normal

Sumber: Data diolah (2019)

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk melihat adanya korelasi diantara variabel independent yang digunakan di penelitian ini. Dimana penelitian yang baik seharusnya tidak mengalami multikolinearitas diantara variabel nya (Ghozali, 2001). Adanya korelasi diantara variable penelitian menyebabkan nilai taksiran dari koefisien regresi menjadi tidak stabil dan mandiri. Untuk mendeteksi tingkat kolinieritas antara variabel independen maka dapat digunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Person Correlation Matrix.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Kompetensi Perangkat Desa	.778	1.285
Partisipasi Masyarakat	.673	1.486
Pemanfaatan Teknologi	.797	1.254

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa tidak ada variabel independent di dalam penelitian ini yang memiliki nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 dan juga nilai VIF yang lebih besar dari 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

4. Hasil Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pengujian hipotesis yang menggunakan metode analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terhadap variabel terikat yaitu Kualitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil regresi pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.490	.396		3.765	.000
Kompetensi Perangkat Desa	.257	.088	.322	2.928	.005
Partisipasi Masyarakat	.221	.075	.347	2.933	.005
Pemanfaatan Teknologi	.193	.082	.257	2.367	.022

Sumber: Data diolah (2019)

Dari hasil analisis uji regresi pada Tabel 5 maka model regresi penelitian ini yaitu:

$$KPPD = 1,490 + 0,257KPD + 0,221PM + 0,193PTI$$

KPPD = Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa

KPD = Kompetensi Perangkat Desa

PM = Partisipasi Masyarakat

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan variable dependent menggunakan koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi adalah antar 0 s/d 1. Semakin mendekati 1

maka pengaruh variable independent terhadap variable dependent semakin kuat. Hasil uji koefisien determinasi untuk penelitian disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R square	Adjusted R square
1	0,720 ^a	0,519	0,491

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 6, nilai koefisien determinasi untuk (R²) adalah 0,519, hal ini menunjukkan pengelolaan dana desa sebagai variabel dependent dapat dijelaskan oleh tiga variabel independent, yaitu: Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan nilai detrmniasi sebesar 51,9%.

6. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel Independent berpengaruh simultan terhadap variable dependent. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $sig F < 0,05$, maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Dan begitu juga sebaliknya. Hasil pengujian secara simultan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig
Regression	2,748	3	0,916	18,343	0,000
Residual	2,547	51	0,050		
Total	5,295	54			

Sumber: Data diolah (2019)

Tabel 7 menunjukkan bahwa variable independent memiliki F_{hitung} sebesar 18,343. Berdasarkan Tabel diperoleh $df(N1) = 3$ dan $df(N2) = 51$, sehingga F_{tabel} sebesar 2,79. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu $18,343 > 2,79$ dan nilai Sig. $0,000 < 0,05$ maka H_{01} di tolak, dan H_{a1} diterima. Artinya seluruh variable dependent berpengaruh secara simultan terhadap variable independent.

7. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh setiap variable secara parsial dan individual terhadap variable dependent. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau nilai sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak, dan H_a diterima. Nilai t_{tabel} dengan $df (n-k) = 51$ adalah bernilai 2,007. Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa t_{hitung} seluruh variable di atas 2,007 (Tabel 5). Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian pada variabel *Kompetensi Perangkat Desa* didapatkan nilai t hitung 2,928. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,005, artinya variabel *Kompetensi Perangkat Desa* berpengaruh signifikan terhadap *Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa* pada desa di Kecamatan Kota Jantho.
- 2) Hasil pengujian pada variabel *Partisipasi Masyarakat* didapatkan nilai t hitung 2,933. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,005, artinya variabel *Partisipasi Masyarakat* berpengaruh signifikan terhadap *Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa* pada desa di Kecamatan Kota Jantho.
- 3) Hasil pengujian pada variabel *Pemanfaatan Teknologi Informasi* didapatkan nilai t hitung 2,367. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,022, artinya variabel *Pemanfaatan Teknologi Informasi* berpengaruh signifikan terhadap *Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa* pada desa di Kecamatan Kota Jantho.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka berikut akan dibahas pengaruh variabel independen, yaitu *Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat* dan *Pemanfaatan Teknologi dan Informasi* terhadap variabel dependen, yaitu *Pengelolaan Keuangan Desa*.

1. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pertama menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (β_1) untuk variabel kompetensi desa adalah 0,257. Hipotesis menentukan apakah $\beta_1: 0: H_a$ diterima, yang berarti bahwa kompetensi aparat desa mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Koefisien regresi (β_1) dari kompetensi aparat desa (X_1) sama dengan 0,257,

yang berarti bahwa setiap kompetensi desa meningkat sebesar 1 unit pada skala interval, maka manajemen keuangan desa akan meningkat sebesar 0,257 unit pada skala interval.

Perangkat desa menyadari dalam mengelola keuangan desa dibutuhkan kompetensi yang cukup. Kompetensi dapat ditingkatkan melalui mengikuti pelatihan-pelatihan, pengalaman bekerja, serta menempuh jenjang pendidikan lebih lanjut. Hasil penelitian dari Husna (2016) juga menekankan pentingnya kompetensi perangkat desa dalam mengelola keuangan desa.

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa koefisien regresi (β_2) untuk variabel partisipasi publik adalah 0,221. Hipotesis menentukan apakah $\beta_2 > 0$: H_a diterima, yang berarti bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Koefisien regresi (β_2) dari partisipasi masyarakat (X_2) adalah 0,221, yang berarti bahwa setiap partisipasi masyarakat meningkat sebesar 1 unit dalam skala interval, maka manajemen keuangan desa meningkat sebesar 0,221 unit dalam skala interval.

Pengelolaan keuangan desa tidak terbatas pada perangkat desa, namun juga meliputi pihak masyarakat. Keuangan desa dikelola untuk mencapai target pembangunan yang dibutuhkan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan aspirasi, pengambilan keputusan, serta mengawasi manajemen keuangan pedesaan. Survei menunjukkan bahwa pejabat desa sadar akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengelola keuangan desa, sehingga penting bagi pejabat desa untuk selalumenyajak partisipasi dari masyarakat dan juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa koefisien regresi (β_3) untuk variabel penggunaan teknologi informasi adalah 0,193. Hipotesis menentukan apabila $\beta_3 > 0$: H_a dapat diterima, yang berarti bahwa penggunaan teknologi informasi memengaruhi pengelolaan keuangan desa. Koefisien regresi (β_3)

menggunakan teknologi informasi (X3) adalah 0,193, yang berarti bahwa setiap penggunaan teknologi informasi meningkat sebesar 1 unit dalam skala interval, maka manajemen keuangan desa akan meningkat sebesar 0,193 unit dalam skala interval.

Kemajuan teknologi tidak dapat dihindari, teknologi berperan penting dalam penyebaran informasi dan mendukung proses pemasukan, pengolahan, dan penyimpanan data. Kemampuan perangkat desa dalam memanfaatkan teknologi informasi dapat menghindari terjadinya keterlambatan, kekeliruan, dan kerahasiaan data-data. Dengan kemampuan dan perangkat teknologi yang memadai, pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan optimal dan mencapai tujuan yang dianggarkan.

F. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dari desa-desa di Kecamatan KotaJhanto yang didapat menggunakan kuesioner, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi pejabat desa, partisipasi publik dan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi manajemen keuangan desa di Kecamatan Kota Jhanto
2. Kompetensi aparat desa mempengaruhi pengelolaan keuangan pedesaan di desa-desa di Kecamatan KotaJhanto.
3. Keterlibatan masyarakat mempengaruhi pengelolaan keuangan pedesaan di desa-desa di Kecamatan Kota Jhanto.
4. penggunaan teknologi informasi mempengaruhi pengelolaan keuangan di desa-desa di Kecamatan Kota Jhanto.

2. Keterbatasan Penelitian

Saat mengumpulkan data, alat kuesioner digunakan dapat menyebabkan masalah jika respons responden berbeda dari situasi aktual. Keterbatasan waktu juga menjadikan pengumpulan data yang dilakukan penulis harus dilakukan secara serentak dan ini mempengaruhi keadaan fisik penulis.

3. Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran:

1. Untuk pejabat desa, mereka diharapkan untuk dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kompetensi terutama dalam manajemen keuangan di daerah pedesaan dan terus berpartisipasi dalam pelatihan agar dapat menerapkan manajemen yang optimal di daerah pedesaan. Pejabat pedesaan juga harus fleksibel dalam melacak kemajuan teknologi untuk mengelola keuangan pedesaan dengan lebih baik.
2. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam manajemen keuangan di daerah pedesaan sehingga mereka dapat mencapai manajemen keuangan yang efektif dan efisien.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Astuti, T.P., & Yulianto, Y. (2016). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang Undang no 6 tahun 2014*. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 1(1).
- Badri, Muhammad. (2016). *Pembangunan Desa Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi pada Gerakan Desa Membangun)*. *Jurnal Risala*. 27(2): 6273.
- Bahri, Syamsul. dan Fakhry. (2014). *Model Penelitian Kuantitatif Berbasis SEM-AMOS*. Yogyakarta: Deepublish.
- Cohen dan Uphoff. (1977). *Rural Development Participation*. Cornell University, New York, US.
- Depdiknas. (2005). *Panduan Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Direktorat PPTK dan KPT Dirjen Dikti.
- Echols, Jhon, M. dan Hasan Shadily, (2000). *Kamus Inggris Indonesia, An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: AdicitaKurniawan. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hanafiah, R. R., Abdullah S. A. S., & Saputra, M. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Skpk Kabupaten Aceh Utara)*. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 5 (4).
- Hasibuan. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hevesi. G. Alan. (2005). *Standards for Internal Control in New York state government*. [http:// www.osc.state.ny.us](http://www.osc.state.ny.us).
- Husna, S., dan Abdullah, S. (2016). *Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa secara Akuntabilitas sesuai dengan UndangUndang No 6 tahun 2014 tentang Desa (studi pada beberapa desa di Kabupaten Pidie)*. *Jurnal Imiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, I (1), 282-293.

- Indriani, Nadirsyah, N. Fahlevi, H., dan Putri, S. (2019). *Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa, Survey pada desa Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar*. *Jurnal Riset Akuntansidan Keuangan*, 7 (1). 111-130.
- Jogiyanto, H.M. (2017). *Analisis dan Desain Sistem Informasi dan Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. ANDI: Yogyakarta.
- Mardjiono, dan Didik Eko. (2009). *Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Pemanfaatan, TIK dan Implementasi Struktur Organisasi yang Terdesentralisasi terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada RSUD Kab. Temenggung)*. Tesis. Universitas Padjajaran.
- Marzuki M., 2004, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM, Jakarta, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mayowan, Y. (2017). *Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa (studi Kasus di Kabupaten Lamongan)*. *Profit (Jurnal Administrasi Bisnis)*. 10(1): 14-23.
- Mitrani, A. (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis Kompetensi (Terjemahan)*. P.T. Intermasa. Jakarta.
- Moses, M. (2012). *Pengaruh Analisis Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman Kerja terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua*. *Media Riset Bisnis dan Manajemen*, 12(1). 18-36.
- Mubyarto. (1994). *Strategi Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: P3PK UGM
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rahadi, Dedi Rianto. (2007). *Pelayanan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik. Seminar Nasional Teknologi*. Yogyakarta.
- Regah, R. T., Sabijono, H., & Pinatik, S. (2019). *Analisis Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Pelatihan Pada Pelayanan Aparatur Pajak di UPTD Samsat Amurang*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14 (1).
- Roshanti, A., Edy Sujana, S. E., & Sinarwati, N. K. (2014). *Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan IT, dan system Pengendalian Intern, terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, Undiksha, 2(1).

- Rusmayanti, A. (2013). *Sistem Informasi Pengelolaan keuangan pada Desa Ngadirejan*. Speed-sentra Penelitian Engineering dan Edukasi , 6(2).
- Sekaran, Rougie Bougie. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shokib dan Rosmiwari. (2016). *Pengembangan Kompetensi Aparatur Dalam Perspektif Pengelolaan dan Pelayanan Umum di Kantor Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP). 5(2): 64-70.
- Sismudjito dan Ameilia Zuliyanti Siregar. (2016). *Social Motivation and People's Participation in Development of Rural Development in District of West Nias province North Sumatra*. International Journal of Scientific & Technology Research. 5(10): 47-58.
- Soetrino, Loekman. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Karnisius.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sugiarti, E., dan Yudianto, I. (2017). *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. (Survey pada desa-desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majajaya, dan Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang)*. Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis (SNAB). Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta : Rinika Cipta.
- Tikollah, M.R.dan Ngampo, M. Y. A. (2018). *Analisa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*. JEKPEND: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 1(1), 87-96.
- Wahana Komputer. (2003). *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Yogyakarta: ANDI
- Wilkinson, J. W., Cerullo, M. J., Raval, V., and Wong Ong Win, B. (2000). *Accounting Information Systems Essential Concepts and Applications*, John Willey and Sons. Inc., USA.